



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 31 Januari 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.40 WIB s.d 18.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010; 2. Rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2011; 3. Implementasi pembangunan berbasis tata ruang
Ketua Rapat	: Drs. Yoseph Umarhadi, MSi, MA
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 14.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini adalah membahas mengenai potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010; rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2011; dan implementasi pembangunan berbasis tata ruang.
3. Ketua mempersilakan kepada Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mengapresiasi cukup tingginya prosentase realisasi fisik Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang per 31 Desember 2010 tercatat sebesar 92,03% realisasi keuangan dan 94% realisasi fisik. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempertahankan prestasi tersebut di masa mendatang.

2. Terkait masih rendahnya jumlah Perda Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota (7, 14, dan 4) sementara Menteri Pekerjaan Umum telah memberikan persetujuan substansi RTRW dari Menteri Pekerjaan Umum tercatat baru 20 Provinsi, 42 Kabupaten dan 16 Kota Untuk itu Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk lebih meningkatkan tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis guna mempercepat penyelesaian Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan pengawasan teknis melalui tindakan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan tata ruang di daerah serta melakukan monitoring dan mendorong atas pemberian sanksi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
4. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah melalui Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat revisi RTRW dan RTR Kawasan pada daerah-daerah yang terkena bencana antara lain Wasior, Mentawai, dan Merapi.
5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong pemberian insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dengan prestasi penyelesaian revisi dan pelaksanaan RTRW.
6. Guna mendorong optimalisasi penyelenggaraan Tata Ruang maka Komisi V DPR RI mendukung peningkatan alokasi anggaran Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembahasan APBN-P 2011 yang akan datang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

**DIRJEN PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Jakarta, 31 Januari 2011
KETUA RAPAT,

IR. IMAM SANTOSO ERNAWI, MCM, MSC

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

1. Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi atas telah terselesaikannya 13 PP yang diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyelesaian 9 Raperpres, 13 Draft Permen PU dan peraturan turunan lainnya demi terciptanya aturan hukum yang tegas dan jelas di bidang penataan ruang.

Jakarta, 31 Januari 2011,
KETUA RAPAT,

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 21 September 2010

KETUA RAPAT,

IR. H. MULYADI

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT**

K E T U A,

IR. A. HELMY FAISHAL ZAINI, SE

SOEHARSO MONOARFA, MA

.....

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**KEPALA BADAN
SAR NASIONAL,**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO,**

DR. IR. SRI WORO B. HARIJONO, MSC

MARSDYA. WARDJOKO

SOENARSO

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. SOEROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA,

SUNARYO, SH

IR. HARRY BAKTI SINGAYUDA, MM

DIRJEN BINA MARGA,

DIRLANTAS MABES POLRI,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSi

MARSDYA. WARDJOKO

